

CASCADING KECAMATAN BANJARNEGARA TAHUN 2026 - 2030

VISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2026	2027	2028	2029	2030	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	2026	2027	2028	2029	2030	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	2026	2027	2028	2029	2030	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat untuk urusan kewilayahan	Nilai Kematanan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah urusan kewilayahan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	BB (72,50)	BB (72,60)	BB (72,70)	BB (72,80)	BB (72,90)	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perangkat daerah urusan kewilayahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian target kinerja pemerintah daerah	Persentase	100	100	100	100	100	Terselenggaranya urusan penunjang pemerintah daerah	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase	100	100	100	100	100	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	14	14	20	
																	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	13	13	13	13	13			
																	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	60	59	58	57	56
																																Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	12	12		
																																Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	16	16	16	16		
																									Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	Persentase	100	100	100	100	100	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	14	14	14	14	14	
																																Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	87	87	87	87	87		

						Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah urusan kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	84,25	84,35	84,45	84,55	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase	100	100	100	100	100	100	Terselenggaranya layanan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Persentase terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Perse ntase	100	100	100	100	100	100	Terlaksananya Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1	1	1	1	1
																								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	Perse ntase	100	100	100	100	100	100	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perijinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perijinan Usaha yang di Laksanakan.	Dokumen	12	12	12	12	12	12	
																																	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait Pelayanan Non Perizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	12	12	12	12	12	12	
																																	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di limpahkan	Laporan	1	1	1	1	1	1	
						Terwujudnya koordinasi dan Fasilitasi pemberdayaan Desa/Kelurahan	Indeks Desa Membangun Wilayah	Angka	0,6580	0,6590	0,6600	0,6610	0,6620	terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan koordinasi urusan pemerintahan umum serta pembinaan dan pengawasan	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga desa/kelurahan di kecamatan yang terfasilitasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang terlaksana	Perse ntase	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan wilayah kecamatan	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan pemberdayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	1	1	1	1	1	1
																								Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Perse ntase	65	65	65	65	65	65	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lemba ga Kemasy arakatan	2	2	2	2	2	2	
																								Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dan lembaga di kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan kelurahan	Perse ntase	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga Kemasy arakatan	81	81	81	81	81	81
																																	Terbangunya Sarana dan Prasarana kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	unit	45	45	45	45	45	45	
																																	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ormas	81	81	81	81	81	81	

[illegible]

